WORKING PAPER SERIES

No. 13/A/III/2008

INDONESIA, GLOBALISASI PEREKONOMIAN & KEJAHATAN EKONOMI INTERNASIONAL

Didin S. Damanhuri

DEPARTMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY

INDONESIA, GLOBALISASI PEREKONOMIAN & KEJAHATAN EKONOMI INTERNASIONAL

Didin S. Damanhuri[1]

1. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor

Diterima September 2007 untuk dipublikasikan Februari 2008

Globalisasi perekonomian telah menjadi *hard fact* bagi semua negara termasuk berlaku di negara–negara sedang berkembang (NSB). Bagi sebagian negara, terutama bagi negara industri maju (NIM) telah mendatangkah berkah. Namun bagi sebagian besar lainnya, terutama sebagian besar NSB belum banyak mambawa manfat, bahkan tak sedikit menimbulkan bencana baik berupa makin membengkaknya kemiskinan dan pengangguran serta menajamnya ketimpangan. Namun bersamaan pula makin marak dan canggihnya kualitas kejahatan (tindak pidana) baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk tidak pidana ekonomi. Dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana kepentingan Indonesia dengan memahami latar belakang dan *economic, social and historical setting* terjadinya globalisasi, dampak positif dan negatifnya globalisasi, kewaspadaan menghadapi globalisasi, dampak globalisasi terhadap perekonomian terutama bagi Indonesia dan dampak globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional.

'*Global Bubble Economy*'

Semenjak keruntuhan komunisme dan berakhirnya periode perang dingin awal dekade 80-an, praktis secara politik dunia memasuki periode Pax-Americana. Yakni semua negara mau tak mau harus melakukan *political adjustment* terhadap kekuatan politik dan militer AS beserta sekutu-sekutunya (tergabung dalam G-7). Dan hal ini juga membawa konsekuensi secara ekonomi. Dunia juga masuk secara monolitik ke dalam sistem perekonomian neo-liberal yang terlembagakan ke dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya ke dalam organisasi World Trade Organization (WTO). Jika ditilik secara intensif, maka kita melihat bagaimana azas neoliberalisme mendominasi dalam spirit WTO di mana praktis lembaga tersebut telah menjadi 'wasit' dalam proses globalisasi. Ini mengingat jargon *the borderless world* yang mereka implementasikan dalam aturan WTO. Yakni semua negara yang telah meratifikasikan pelbagai aturan yang tercantum dalam WTO, antara lain terpenting bahwa semua negara harus menghilangkan semua hambatan perdagangan – baik tarif maupun nontarif – dengan jadwal keharusan pelaksanaannya yang sangat ketat beserta sanksi yang keras jika sebuah negara tak mentaatinya.

Dengan begitu, berarti semua negara nantinya tanpa kecuali harus siap bersaing secara bebas dalam perdagangan internasional. Dengan harga dan kualitas barang dan jasa yang mereka hasilkan, mereka harus bersaing tanpa perlindungan (proteksi tarif maupun non-tarif) dan subsidi apa pun kecuali untuk hal-hal yang sangat terbatas, misalnya bantuan untuk pelatihan bagi kalangan SME (*small and medium enterprises*). Juga dalam 'era WTO' ini, berarti azas neoliberalisme cenderung mengabaikan keragaman kemampuan antara negara dalam *level of playing field.* Padahal dengan prinsip tersebut, bahwa persaingan hanya akan menghasilkan kemakmuran bersama (*prinsip pareto optimality/positive some game*) jika diciptakan suatu kesamaan level dalam kemampuan masing-masing peserta/pelaku kegiatan ekonomi.

Ini justru oleh Adam Smith sendiri -- Bapak/Pendiri Ekonomi Modern -- harus dipertimbangkan dalam menciptakan persaingan antara pelaku ekonomi baik tingkat perusahaan maupun negara. Dengan kata lain, seperti layaknya dalam dunia pertinjuan dengan adanya kelas-kelas yang dipertandingkan (yang sama levelnya: ringan, terbang dan berat), maka dalam alam globalisasi ekonomi yang dipimpin WTO dan Negara Industri, dengan demikian akan cenderung diabaikan. Dengan suasana ini memang secara positif masing-masing negara mempersiapkan semaksimal mungkin agar pada saatnya mampu memasuki dalam era persaingan global yang keras tersebut. Ini antara lain terlihat kesibukan para pelaku ekonomi dan politik menyambutnya dengan pelbagai kegiatan, baik di tingkat mikro (peningkatan kapabilitas SDM, manajerial, permodalan, teknologi, informasi) maupun makro (demokratisasi politik, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, deregulasi ekonomi, reformasi birokrasi).

Dengan demikian, dilihat dari sisi ini, kejatuhan pemerintahan otoritarian dan korup di pelbagai belahan dunia termasuk di negeri ini tempo hari, bisa difahami sebagai konsekuensi positif dari adanya tuntutan global dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam era globalisasi.

Namun, dampak lainnya juga amat dahsyat. Antara lain dalam perkembangan dunia finansial. Diawali, dalam rangka reposisi kalangan MNC (*Multi National Corporation*) menghadapi persaingan global. Yakni, pada awal tahun 80-an, kalangan MNC yang bermula berpangkalan di AS dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan. Mereka memanfaatkan dana-dana nganggur semisal yang berada di lembaga-lembaga dana pensiun dan asuransi. Juga memburu dana murah di pasar modal atau bermain valas dalam pasar uang.

Cara ini lantas menjalar ke negara-negara industri lainnya di Eropa dan Jepang. Lantas ke negara-negara Industri Baru: Singapura dan Hongkong hingga menghinggapi semua negara dan menjalar ke semua level perusahaan (besar, menengah bahkan kecil) yang praktis di akhir tahun 80-an dan 90-an terjadi peningkatan arus moneter yang sangat luar biasa dahsyatnya tanpa diimbangi oleh peningkatan arus barang dan jasa yang setara. Pakar manajemen tingkat dunia Peter Drucker menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter serta arus barang dan jasa tersebut sebagai adanya *decoupling.* Yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang yang tak diimbangi dengan arus barang dan jasa. Bersamaan dengan fenomena tersebut marak pula kegiatan ekonomi dan bisnis spekulatif (terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan properti), sehingga dunia terjangkit penyakit 'ekonomi balon' (*bubble economy*). Sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektor riil bahkan sektor riil tersebut amat jauh ketinggalan perkembangannya.

Sekadar ilustrasi dari fenomena *decoupling* tersebut misalnya sebelum krisis Asia, dalam satu hari dana yang gentayangan di pasar modal dan pasar uang dunia diperkirakan rata-rata beredar sekitar 2-3 triliun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun dolar AS. Padahal arus perdagangan barang secara internasional dalam satu tahun hanya berkisar sekitar 7 triliun dolar AS. Jadi perbandingannya berarti arus uang sekitar 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang.

Sejak itu pula fungsi uang bukan lagi sekadar menjadi alat tukar dan penyimpanan kekayaan. Tapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memperoleh *gain.* Tapi sebaliknya bagi mereka yang merugi dalam satu titik waktu transaksi, orang bisa mengalami kerugian miliaran dolar AS (trilyunan rupiah).

Selanjutnya dalam konteks ’Ekonomi Balon Dunia’ tersebut, bagaimana relevansi Utang (baik utang Pemerintah, lembaga Multilateral maupun Investasi langsung Swasta Asing) bagi negara-negara Dunia Ketiga ? Sesungguhnya, hingga sekitar tengah dekade tahun 80-an, persepsi tentang utang luar negeri secara umum di dunia ketiga, masih menggambarkan prospek positif mengingat kisah sukses yang dicapai beberapa negara. Antara lain sejak sukses fantastis negara non-Barat yang dipertontonkan Jepang disusul empat negara industri baru (Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong) serta Malaysia, Thailand Cina, Vietnam, dan Indonesia yang kesemuanya di Asia. Selain itu Pantai Gading di Afrika adalah contoh negara-negara yang dianggap sukses mengelola utang secara relatif efisien dan efektif. Yang dianggap ’lumayan’ antara lain India, Mesir, Brazil, Argentina, Meksiko, Chili, Peru. Artinya negara-negara yang disebut terakhir pernah gagal lantas kembali mampu memperbaiki kinerja ekonomi maupun politiknya dengan tetap memanfaatkan utang luar negeri untuk strategi pembangunannya. Sedangkan hampir sebagian besar negara-negara Afrika dan Amerika Latin serta Asia Selatan lainnya dianggap telah terperangkap oleh utang sejak awal keterlibatan dengan utang luar negeri hingga kini. Penyebabnya justru karena umumnya negara-negara tersebut otoriter dan korup.

Itu semua merupakan situasi umum sebelum krisis Asia dan globalisasi yang semakin riil sejak awal tahun 90-an. Artinya terdapat tiga kategori negara-negara dunia non-Barat dalam memanfaatkan utang luar negeri: sukses, lumayan, dan gagal. Dan itu terkait bukan hanya karena kaitan dengan utang luar negeri dengan manajemen ekonomi *an sich,* tapi juga erat hubungannya dengan tingkat dan proses demokrasi politik, ekonomi, dan sosial secara timbal balik.

Selanjutnya, terutama sejak krisis Asia tengah 1997, persepsi tentang utang luar negeri berubah arti secara signifikan. Yakni karena fenomena atas peran *fund managers* semacam Soros dkk, *global and national bubble economy, bad governance* dan hegemoni negara industri yang telah menciptakan ketidakadilan global. Maka persepsi tentang utang luar negeri baik bilateral, multilateral (terutama peran IMF dan World Bank), utang swasta (peran utang jangka pendek dan *portfolio investment*) telah dipersepsikan sangat merugikan NSB, bahkan sebagai bentuk baru kolonialisme dan imperialisme.

Yang masih dianggap positif tampaknya adalah modal asing dalam bentuk FDI (*Foreign Direct Inventment*) yang relatif bagi negara-negara penerima investasi masih lebih banyak manfaatnya baik dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, penyerapan teknologi, manajemen, pengetahuan dan pengalaman tanpa terlalu banyak campur tangan asing dalam pengelolaan problem domestik negara penerima modal. Iran Pasca Syah Iran adalah negara yang jumlahnya nol dalam utang pemerintahnya dan hanya memanfaatkan kerangka FDI saja. Juga fenomena keberhasilan yang spektakuler dari Malaysia dalam menghadapi krisis Asia untuk pemulihan dan kebangkitan ekonominya tanpa bantuan IMF. Bahkan nama Mahatir Muhammad telah terpatrikan di dunia yang dianggap menjadi pelopor untuk menentang hegemoni negara maju serta seringkali melontarkan pentingnya *Asian monetary fund* dan bahkan pelopor untuk membangun 'arsitektur baru keuangan dunia' dan menganggap arsitektur lama hanya menguntungkan kepentingan negara-negara maju.

Sisi Positif dan Negatif Globalisasi

Wacana tentang globalisasi yang berlangsung sampai saat ini telah terentang dari mulai kubu pro-globalisasi hingga kubu anti-globalisasi. Memang sulit mengambil posisi netral. Bagaimanapun, dalam realitas telah terjadi akselerasi dan intensifikasi dalam interaksi ekonomi di antara orang per orang, antar perusahaan hingga antar negara akibat globalisasi tersebut.

Perdagangan internasional dalam jarak geografis yang jauh sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Beberapa abad yang lalu, orang-orang dan perusahaan-perusahaan di satu negara juga sudah melakukan investasi di lain negara. Selanjutnya, beberapa dasawarsa yang lalu, perkembangan teknologi telah memacu peningkatan besar-besaran lintas-batas perdagangan, investasi, dan migrasi.

Sejak tahun 1950, volume perdagangan dunia telah meningkat duapuluh kali lipat. *Population Bulletin* mencatat, perdagangan barang dan jasa jumlahnya mencapai 6,5 triliun dolar AS pada tahun 2000, yaitu hampir seperempat dari total produk domestik bruto (PDB) dunia yang besarnya 31 triliun dolar AS. Sedangkan arus investasi asing, dari tahun 1997 hingga 1999 saja, besarnya hampir dua kali lipat (dari 468 miliar dolar menjadi 827 miliar dolar AS). Itulah globalisasi, nama yang diberikan pada pertumbuhan kegiatan ekonomi global yang tumbuh semakin intensif. Namun, globalisasi itu juga bisa berarti "regionalisme". Misalnya, ketika terungkap bahwa 75 persen perdagangan dan 80 persen produksi berlokasi di dalam tiga blok besar perdagangan regional di dunia ini, yaitu Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat (AS).

Globalisasi telah digerakkan oleh kebijakan-kebijakan perekonomian terbuka secara domestik dan internasional. Dalam tahun-tahun usai Perang Dunia II, terutama satu-dua dasawarsa terakhir, banyak pemerintah telah menerapkan sistem ekonomi pasar bebas, meningkatkan secara besar-besaran potensi produksi mereka dan menciptakan banyak peluang baru dalam perdagangan internasional dan investasi.

Pemerintah-pemerintah satu sama lain juga menegosiasikan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dan investasi. Dalam peluang-peluang baru pada pasar mancanegara itu, terutama perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) negara industri maju, merelokasi pabrik-pabrik mereka, berproduksi, dan membuat aturan pemasaran dengan mitra local mereka. Dalam struktur industri internasional, ribuan perusahaan raksasa mancanegara beroperasi di banyak negara. Teknologi juga menjadi penggerak utama dari globalisasi tersebut. Khususnya, kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi telah mengubah secara dramatis kehidupan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, mempermudah pengiriman dokumen, riset, bekerja sama dengan banyak mitra, mengoleksi dan menganalisa data.

Teknologi informasi dan komunikasi ini diemban oleh semua pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, pengerah tenaga kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Teknologi itu juga telah memungkinkan perusahaan-perusahaan raksasa untuk memperluas operasi mereka di seluruh dunia, dan mengelola secara lebih efektif proses produksi dan inventori mereka.

Karena itu, banyak yang mengatakan bahwa globalisasi itu adalah fenomena yang sangat menjanjikan. Ekspansi perdagangan internasional boleh dikatakan menawarkan banyak peluang, termasuk kepada yang paling miskin sekalipun, untuk memperbaiki keberuntungan ekonomi mereka. Tetapi, globalisasi juga bisa berdampak tak nyaman. Kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara, atau sebagian besar penduduk suatu negara, yang berada di pinggiran perekonomian dunia *(periphery capitalism*).

Lagi pula, kebanyakan orang di dunia mempunyai akses terbatas pada teknologi yang telah mengalihkan perekonomian industri menjadi “perekonomian informasi” yang popular dengan sebutan *new economy*. Sementara itu, globalisasi membawa sejumlah kecil orang yang lebih beruntung menjadi lebih makmur. Lebih jauh, kecepatan perubahan ekonomi yang menawarkan janji bagi banyak hal itu secara serempak juga dapat mengancam nilai-nilai, seperti kearifan budaya lokal, lingkungan atau kelangsung bisnis pribumi. Ada kecemasan bahwa globalisasi akan semakin meningkatkan pengaruh perusahaan-perusahaan raksasa mancanegara terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, perlu dicari cara terbaik untuk mendapatkan manfaat globalisasi. Tampaknya peranan kuncinya berada di tangan pemerintah, misalnya dalam sikap keberpihakan terhadap tenaga kerja serta UKM.

Globalisasi juga sering disebut sebagai proses standarisasi internasional, yakni bergerak menuju gaya atau pola tunggal, yang cenderung menghilangkan budaya tradisional dan mematikan UKM local. Contohnya, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Microsoft yang mengontrol sistem operasi lebih 90 persen *personal computer* (PC) yang dijual di pasar dunia saat ini. Atau monopoli yang berkembang dalam perdagangan gandum, industri energi, dan banyak sektor lainnya. Jadi, sebenarnya globalisasi juga berarti sejumlah kecil perusahaan mengontrol sedemikian rupa total bisnis dalam suatu sektor, yang memungkinkan mereka dapat mengontrol pasar, misalnya dalam industri kimia, komunikasi, bioteknologi, dan keuangan.

Kewaspadaan terhadap Globalisasi

Tanpa harus dikelompokkan sebagai kubu antiglobalisasi, yang juga harus diungkapkan adalah sisi gelap globalisasi. *Pertama*, kasus actual kemerosotan ekonomi dunia saat ini. Seorang kolumnis *Boston Globe* mengatakan (Charles Steis, 2003): ”dalam dunia yang menciut, baik dan buruk dapat dengan mudahnya berpindah-pindah. Saat ini, kekuatan gelap globalisasi tampaknya lebih kuat mengenggam.” Dalam kenyataan ekonomi dikatakan, kaitan-kaitan erat di antara negara-negara telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi AS merambat ke Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Kenyataan itu juga menciptakan beban pasar global. Sejak Maret 2000, harga saham perusahaan-perusahan asal AS sebagaimana diukur oleh *Standard & Poor* adalah 500, turun sekitar 40 persen. Dalam periode yang sama, harga saham turun 42 persen di Inggris, 57 persen di Prancis, dan 63 persen di Jepang. Setelah itu pengaruh negatifnya menyebar ke seluruh negara.

Charles Stein juga mengungkapkan bahaya deflasi (menurunnya kegiatan ekonomi, prulduksi yang disertai meningkatnya penganghuran) yang melanda dunia yang bisa segera merembet ke semua negara termasuk negara-negara miskin. Kombinasi dari kelebihan produk *(overcapacity)* di banyak industri dan naik kelasnya negara berbiaya-rendah seperti Cina telah memberikan tekanan pada harga-harga. Harga rendah adalah suatu plus. Sementara, harga jatuh bisa merupakan petaka. Dia pun mengutip kesaksian Gubernur Bank Sentral AS waktu itu, Allan Greenspan, di depan Kongres AS yang memperingatkan bahaya deflasi tersebut, dengan mengatakan hal itu akan memaksa kalangan bisnis untuk memotong biaya. Bagian dari upaya pemotongan biaya ini menyangkut pekerjaan *outsourcing* ke negara-negara berkembang yang pada gilirannya akan memperparah situasi pengangguran.

Kemudian, kasus lama tetapi masih tetap aktual, yaitu kemiskinan. Tak kurang satu studi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melaporkan, antara lain (Charlotte Denny, et.al, 2002), akibat dari globalisasi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut *(extreme poverty)* di NSB lebih besar daripada yang terpikirkan sebelumnya, yakni 307 juta orang di mana mereka hidup kurang dari satu dolar AS sehari. Dan jumlahnya akan meningkat menjadi 420 juta dalam satu setengah dasawarsa ke depan.

Sesungguhnya, dalam kenyataannya perekonomian industri selama 40-50 tahun yang lalu telah menjadi perekonomian pasca industri. Mayoritas penduduk bekerja di sektor jasa. Organisasi Buruh Sedunia (ILO) mengungkapkan, bahwa hampir 80 persen penduduk yang bekerja di dunia dewasa ini berasal dari negara berkembang. Sembilan dari sepuluh pekerja yang memasuki angkatan kerja di dunia diperkirakan berasal dari negara berkembang.

Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat 500 MNC terbesar di dunia mengendalikan 70 persen perdagangan dunia, yang terdiri dari 1/3 ekspor manufaktur, ¾ perdagangan komoditas, dan 4/5 perdagangan jasa teknik dan manajemen. Raksasa MNC tersebut menguasai 2/3 investasi di negara-negara berkembang. Tahun lalu, terdapat lebih dari 60 ribu MNC dengan 700 ribu cabang di seluruh dunia.

Kontrasnya dari sisi tenaga kerja, ILO memperkirakan setidaknya 246 juta anak berusia 5-14 tahun bekerja penuh atau paro-waktu setiap hari di dunia, terutama di negara berkembang. Perkiraannya, 150-160 juta orang, 70 juta dari Cina dan 50 juta darii Afrika bekerja di luar negara mereka dalam kaitan kerawanan kondisi kerja. Termasuk, bekerja di pabrik-pabrik buangan beracun.

Selanjutnya, kebijakan-kebijakan globalisasi memungkinkan pergerakan bebas lintas batas produk dan modal. Namun globalisasi juga jauh dari mengurangi arus migrasi internasional, yang tekanan-tekanannya justru akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Sementara, pergerakan bebas barang dan modal antara negara-negara kaya dan miskin tidak cukup besar untuk mengimbangi kebutuhan lapangan kerja di negara-negara miskin.

Di sini, kita harus berbicara tentang globalisasi tenaga kerja. Kita tidak lupa mencatat bahwa dewasa ini bangsa kita menghadapi problem pengangguran yang jumlahnya sekitar 40an juta orang, serta rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Globalisasi ala *WTO (World Trade Organization)* bukannya memperingan bahkan dapat lebih memperburuk keadaan.

Dengan menyadari tantangan dari adanya paradoks globalisasi tersebut terhadap situasi ketenagakerjaan, maka isu peningkatan standar kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor industri barang dan jasa kita, selayaknya sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh kalangan pelaku bisnis. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas maupun penguatan daya saing bangsa kita di mancanegara.

Khusus tentang standar kompetensi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, adalah merupakan faktor penting dalam menguji kesungguhan kita mengantarkan mereka menjadi pemain kelas dunia. Upaya pembenahan TKI selama ini seolah jalan di tempat, masalah-masalah yang berulang-ulang ditemukan di lapangan yang seharusnya bisa terpecahkan secara sistematis. Padahal, pada 2002, mereka telah menyumbang 3,2 miliar dolar atau mendekati Rp 30 triliun – diperkirakan jumlah tersebut baru sekitar 50 persen yang tercatat di perbankan.

Siasat Indonesia dalam mengadapi Globalisasi

Globalisasi dalam arti empiris, bisa mengandung gejala sebagai bentuk imperialisme baru dari negara-negara industri maju (NIM) *vis-a-vis* negara-negara sedang berkembang (NSB). Namun dalam era di mana peran teknologi informasi semakin massif serta hegemoni negara industri maju tak terhindarkan, kini praksis globalisasi mengalami objektivikasi (menjadi faktor objektif).

Semua negara mau tak mau menerima Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi badan supra nasional yang mampu memaksa negara manapun mencabut semua hambatan tarif dan non-tarif. Termasuk mencabut subsidi untuk orang miskin dan sektor-sektor ekonomi yang sensitif seperti pertanian. Dalam konteks tersebut, pemerintahan di negara-negara sedang berkembang – dengan euforia demokrasi dan politik – makin dilemahkan. Elite bisnis, LSM, politik, maupun pemerintahan di negara-negara sedang berkembang makin mewakili kepentingan kaum metropolis di negara-negara industri maju daripada memperjuangkan rakyatnya yang semakin lemah baik secara ekonomi maupun politik.

Secara kronologis, terbentuknya WTO awalnya dilatarbelakangi oleh perjuangan NSB. Tujuannya agar mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya yang terbelakang akibat bertumpu pada ekspor bahan mentah. Itu dilakukan pasca-Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang dipelopori Indonesia, India, dan Alzajair.

Kemudian terjadi serangkaian putaran perundingan Utara-Selatan yang merumuskan komitmen negara-negara industri maju untuk membuka pasarnya terhadap produk olahan negara-negara sedang berkembang setelah merealisasikan minimal satu persen produk domestik bruto (PDB) dari negaranegara industri maju untuk pembangunan negara-negara sedang berkembang dalam rangka *development decade* Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Tak dinyana, terjadi kejaiban Asia. Negara-negara industri baru Asia seperti Jepang, Korea-selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia berhasil menguasai pasar Amerika Serikat (AS) sesuai dengan level teknologinya masing masing.

Sementara itu, AS mengalami *double crisis* (krisis neraca anggaran dan perdagangan) secara kolosal hingga masa pemerintahan Ronald Reagan dengan besaran mencapai 500 miliar dolar AS. AS praktis menjadi negara pengutang terbesar di dunia terhadap perusahaan asing (*foreign direct investment, FDI*) terutama terhadap negara-negara industri baru Asia.

Pemerintah Bill Clinton kemudian melancarkan *dual track policy*. Di satu pihak berusaha melakukan perbaikan ke dalam agar daya saing industrinya dapat unggul kembali -- terutama menghadapi serbuan produk egara-negara industri baru Asia -- di lain pihak membalikkan putaran perundingan Utara-Selatan menjadi strategi untuk menyelesaikan krisis internal AS dari luar. Dalam perundingan di Maroko berhasil dibentuk WTO yang menjamin agar produk-produk unggulan AS khususnya dan NIM pada umumnya bebas masuk ke pasar egara-negara sedang berkembang. Kemudian diciptakanlah isu *borderless* dalam rangka ‘’globalisasi untuk kemakmuran dunia’’ yang pengendaliannya berada di tangan WTO -- di samping sebelumnya telah ada IMF (untuk bantuan moneter) dan Bank Dunia (untuk bantuan program pembangunan). Jadilah trio *global superbody* (WTO-IMF-WB) sebagai alat ampuh AS dalam menegakkan imperiumnya di dunia lewat proses globalisasi.

Memang, dengan tidak netralnya isu globalisasi bukan alibi untuk memaafkan kebobrokan pemerintahan, bisnis, dan politik yang dilakukan elite bangsa sendiri. Tapi kita memerlukan pengembangan wacana ‘’sinergi peradaban”, bukannya *clash of civilization* ala Huntington.

Dalam wacana tersebut, kita menyambut isu globalisasi tak perlu dengan mengobarkan kemarahan terhadap Barat yang unggul dalam segala hal. Lebih baik kita sambut globalisasi dengan penuh kecerdasan dan kritisisme. Tentu harus dengan visi; strategi; dan program yang cerdas, otentik, serta *workable*.

Kita bisa melakukan *benchmarking* seperti Jepang pasca-Restorasi Meiji, di mana segala yang positif dari Barat diserap, seperti iptek, manajemen, cara kerja, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai teknis tersebut diperlakukan sebagai nilai instrumental, bukan sebagai nilai fundamental.

Sementara nilai-nilai mendasar bangsa yang tinggi seperti keseimbangan rasionalisme dan spiritualisme, nilai kesucian perkawinan dan keluarga, tradisi, moral, dan energi keagamaan ”publik” yang penuh cinta kasih dan damai direaktualisasikan ke dalam ekonomi, manajemen, dst.. Juga disinergikan dengan nilai-nilai kontemporer di alam globalisasi seperti efisiensi, iptek, *good governance*, supremasi hukum, demokrasi, proses yang *real time*, impersonalisasi pelayanan, egalitarianisasi hubungan personal, sosial, politik, pemerintahan, dan seterusnya.

Dalam konteks sinergi peradaban tersebut, ukuran keberhasilannya adalah bagaimana agar rakyat keseluruhan terpecahkan soal hak untuk bekerja, berpendapatan layak, kesamaan di depan hukum, representatif secara politik, dan seterusnya sembari secara bertahap dan sistematis membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Jadi masing-masing pihak diukur konstribusinya terhadap upaya pencapaian pemecahan masalah-masalah rakyat tersebut. Dengan demikian, meski problematika yang dihadapi globalisasi begitu sulit dan kompleks, harapan jalan keluarnya masih ada. Hanya terdapat prasyarat agar pencapaian terhadap pemecahan masalah rakyat tersebut lebih terjamin. Berikut ini akan diuraikan prasyarat-prasyarat tersebut.

Peradaban Barat (baca: neo-liberalisme) begitu hegemonik dalam arus globalisasi dewasa ini. Namun beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand berhasil menyiasatinya dengan jalan reformasi (baca: sinergi antara nilai lokal dengan nilai Barat dan proses globalisasi) yang dapat dijadikan *benchmarking* oleh negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Memang, praktis sejak tahun 1980-an, Jepang telah masuk menjadi negara industri maju dengan tingkat industri berbasis iptek canggih serta indikator sosial dan ekonomi berlevel yang sama seperti Eropa maupun AS. Namun model pembangunan Jepang yang otentik, tak sepenuhnya sama seperti Barat.

Untuk tiga negara lainnya, tingkat kemajuannya belum sepenuhnya sama seperti negara industri maju. Namun dibandingkan negara sedang berkembang lainnya, ketiganya sudah jauh melampaui. Dan lagi, apa yang disebut di bagian terdahulu sebagai adanya patriotisme baru dalam menghadapi arus globalisasi, telah benar-benar tampak.

Ketiga negara itu telah berhasil menekan angka korupsi, menekan tingkat pengangguran, pendapatan penduduknya melampaui negara berkembang lain, demokrasi relatif berjalan, kemiskinan dan ketimpangannya relatif telah terpecahkan, serta penegakan *good governance*-nya pun telah berjalan, dan seterusnya.

Keempat negara tersebut telah mampu secara cerdas menyiasati proses globalisasi dan hegemoni peradaban Barat tanpa konflik besar, lebih *manageable*, namun juga tak tersubordinasi. Keempat negara tersebut layak dijadikan *benchmarking* dan prasyarat oleh bangsa kita, dengan sejumlah ciri-ciri.

<u>Pertama</u>, adanya kepemimpinan yang memiliki visi, strategi, dan program yang cerdas, otentik, dan efektif direalisasikan. Misalnya Malaysia sejak Mahathir Mohamad melaksanakan *New Economic Policy (NEP)* sejak pertengahan tahun 1970 hingga lengser tahun 2000. Dengan visi membangun ekonomi bumiputra bersamaan dengan politik integrasi Melayu-non Melayu, serta menciptakan pemerintahan yang efektif dan relatif bersih, akhirnya Malaysia berhasil menyalip Indonesia sejak tahun 1990-an.

Pada saat yang sama Mahathir begitu vokal, kritis, namun cerdas terhadap Barat tanpa menimbulkan konflik yang besar. Begitu juga kepemimpinan Mahathir dalam menyiasati krisis tanpa IMF. Dan *last but not least*, adalah kepemimpinan Mahathir dalam mengakhiri kekuasaannya secara relatif mulus. Untuk Korea Selatan terutama sejak kepemimpinan Kim Young Sam dan Kim Dae Jung, serta Thailand sejak Chuan Leek Pai dan Thaksin hingga sekarang bisa juga dijadikan acuan.

<u>Kedua</u>, adanya proses demokratisasi yang menyejahterakan rakyat banyak dan menegakkan tata-kelola pemerintahan yang efektif serta bersih. Proses demokratisasi di Korea secara akseleratif terutama berlangsung sejak terpilihnya Kim Young Sam. Kemajuan pembangunan ekonomi yang spektakuler dicapai oleh pemerintahan sebelumnya yang otoriter, sejak tahun 1960. Otoriter karena telah menciptakan ketimpangan besar karena peran para konglomerat (*Chaebol*). Setelah proses demokratisasi dilancarkan oleh Kim Young Sam dan Kim Dae Jung, Korea Selatan berhasil menegakkan pemerintahan yang efektif dan mampu menyelesaikan problem ketimpangan rakyatnya dengan penegakan hukum terhadap korupsi skala mega, terutama oleh kalangan konglomeratnya. Juga termasuk hukuman mati terhadap dua mantan Presidennya. Di Thailand, pencapaian yang sama adalah sejak pemerintahan Chuan Leek Pai dan Thaksin.

<u>Ketiga</u>, *resource based economic development*. Malaysia dan Thailand mampu mencapai keberhasilan pembangunan ekonominya yang memadukan antara kemajuan iptek dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kekayaan utama bangsanya, di mana sebagian besar rakyatnya bekerja di sana. Kedua negara tersebut mengakselerasi proses industrialisasi yang berbasiskan sumberdaya alam –di mana mayoritas rakyat bekerja di negara sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, peternakan, pangan, perikanan, pariwisata, dan seterusnya).

Kini Malaysia terkenal dengan hasil devisa yang besar dari sawit, karet, dan produk pertanian lainnya yang telah terolah serta pariwisata. Sementara Thailand merajai ekspor produk-produk agroindustri di dunia untuk teknologi menengah dan sederhana. Pendapatan penduduk rata-rata kedua negara tersebut, sekarang telah hampir sepuluh kali lebih tinggi dari Indonesia.

Keempat, kemampuan mereaktualisasikan nilai-nilai agama, tradisi, dan nilai lokal bersamaan dengan proses ekselerasi industrialisasinya. Jepang, terutama, bukan hanya berhasil memadukannya dengan iptek dan nilai-nilai kontemporer lainnya, tapi bahkan memunculkan model-model pengembangan yang lebih unggul dibandingkan Barat. Misalnya keunggulan model manajemen *Total Quality Control (TQC, Toyotaism*).

Pada saat negara-negara industri maju lainnya menghadapi resesi tahun 1980-an dengan PHK besar-besaran karena penerapan model manajemen *Taylorism* dan *Fordism*, justru Jepang *survive* tanpa PHK berkat model TQC. Bahkan kemudian Jepang menunjukan pertumbuhan ekonomi makronya naik lebih tinggi. Dalam model TQC, antara lain terdapat nilai-nilai seniorism, *long-live worker*, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan seumur hidup, dan seterusnya, yang berasal dari ajaran agama (Sintoisme). Kini Malaysia, juga Indonesia tengah mengembangkan model keuangan dan perbankan syariah yang anti spekulasi (ribawi) yang berpotensi menunjukan keunggulan di masa datang. Lebih umum lagi apa yang dikatakan Naisbitt, bahwa keunggulan kompetitif Asia akan mampu memenangkan persaingan dengan Barat, karena adanya nilai-nilai Asia (*Asian Ways*). Antara lain adanya sistem keluarga besar (*extended family*) yang telah menjadi sistem jaminan sosial keluarga yang efektif dalam menghadapi berbagai risiko pembangunan ekonomi seperti PHK, hari tua, kecelakaan, kesehatan, pendapatan, dan seterusnya, karena merupakan tuntutan kebajikan agama.

Kelima, *consensus scenario in democratization process,* yang berbeda dengan demokrasi Barat yang sangat menekankan kemampuan dalam pengelolaan konflik. Tingkat kesejahteraan pekerja Jepang adalah tertinggi di dunia bersama Swedia. Namun berbeda dengan negara-negara Eropa, keberhasilan Jepang terutama karena peran menciptakan konsensus antara pekerja dan majikan di tingkat mikro-perusahaan dengan melakukan negosiasi harian tentang problem-problem pekerja.

Hal ini menghindari konflik berkepanjangan di tingkat makro antara buruh dan majikan karena serikat buruh yang sangat kuat serta telah terpolitisasi. Demikian lima ciri yang menonjol yang layak dijadikan referensi oleh bangsa kita untuk merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan dan membangun ’’patriotisme baru’’ dalam menghadapi arus globalisasi dan hegemoni Barat dewasa ini.

Dampak Negatif Globalisasi dalam bentuk Kejahatan Ekonomi Internasional

Globalisasi yang disertai perkembangan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication technology, ICT)* disamping telah membawa manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif – seperti dijelaskan diatas – termasuk dalam bentuk lompatan dahsyat (*quantum leap)* dalam perkembangan kejahatan ekonomi internasional. Lebih dahsyat lagi adalah karena adannya mekanisme "pencucian uang" (*money laundering)* dengan berbagai modus operandi, dan "kejahatan lewat dunia maya / mayantara" (*cyber crime).* Dalam uraian selanjutnya akan dikemukakan bagaimana perkembangan kejahatan ekonomi itu berkembang dengan lompatan dahsyat dengan mekanisme *money laundering* dan *cyber crime* tersebut.

Kejahatan Ekonomi lewat Mekanisme *Money Laundering*

Praktek pencucian uang bukanlah sesuatu phenomena yang baru – pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk mengaburkan aktivitasnya– tetapi selalu hadir dalam bentuk yang mutakhir. Sudah sangat lama diindikasikan bahwa masalah praktek pencucian uang merupakan sebuah problem krusial, ramainya masalah perdagangan obat-obatan terlarang (psikotropika), narkoba dan pasokan senjata *illegal* menjadikannya bagian yang penting dalam kegiatan/bisnis tindak pidana. Hasil-hasil kejahatan, umumnya dalam bentuk uang tunai *(cash)* harus dihilangkan asal-usulnya (dicuci) untuk digunakan dalam kegiatan investasi. Kegiatan pencucian ini akan melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi keuangan yang sangat rumit*/complicated* seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dsb, dengan tujuan akhir; uang hasil tindak kejahatan menjadi "bersih" (dalam konteks hukum formal nasional) dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang *legal*.

Masalah pencucian uang saat ini dirasa telah berkembang dengan begitu cepatnya, apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan. Menurut beberapa sumber memperkirakan bahwa jumlah dana yang dilakukan pencucian mencapai jutaan hingga milyar US dollar, yang sebagian besar hasil dari perdagangan gelap/penyelundupan obat-obatan terlarang, penjualan senjata, hasil korupsi, tindak kecurangan dan hasil tindak kejahatan terorganisir lainnya. Praktek pencucian uang dari hasil kejahatan diusahakan untuk diproses melalui kegiatan bisnis normal sehingga akan dapat memasuki (diterima) oleh pasar yang sah, sistem dan/atau aktivitas perkonomian yang wajar.

Para pakar telah membagi proses money laundering kedalam tiga tahap, yaitu: *Placement, Layering dan Integration*. Masing-masing tahap tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

1) *Placement*

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau *immersion* bagi tahap pertama ini, yaitu yang berarti *consolidation and placement*. *Placement* dilakukan dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat besar ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil dan kemudian mendepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau dengan membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (*monetary instruments*) seperti *cheques, money orders* dan lain-lain dan kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening dilokasi lain. Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan tetapi telah pula masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

Dalam tahap *immersion*, pencucian uang dilakukan. Misalnya, seorang pengedar narkoba (*drug dealer*) yang mengumpulkan uang tunai sejumlah 5 juta $US dihadapkan dengan tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Tidak seperti halnya pemalsu uang, yang harus dapat memasukkan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, pencuci uang (*laundryman*) terpaksa mengandalkan pada rekening-rekening bank (*bank accounts*), surat berharga yang dikeluarkan oleh kantor pos (*postal orders*), cek bepergian (*traveler's checks*), dan *negotiable instruments* lainnya untuk menyalurkan uang tunai itu ke dalam sistem perbankan.

2) *Layering*

Pekerjaan dari pihak pencuci uang (*launderer*) belum berakhir dengan ditempatkannya atau disepositokannya uang tunai tersebut ke dalam sistem keuangan seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank tetapi tidak dapat dijelaskan asal usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik pula perhatian para penegak hukum. Setelah pencuci uang berhasil melakukan tahap placement, maka tahap berikutnya ialah melakukan *layering* atau disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

Para pencuci uang melakukannya dengan mengupayakan konversi atau memindahkan dana tersebut menjauh dari sumbernya. Dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment instruments*, atau para pencuci uang cukup dengan melakukan pemindahan dana tersebut dengan cara *funds wire* melalui sejumlah rekening pada berbagai bank di seluruh dunia. Sering hal itu dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan (*dummy company*) yang satu ke perusahaan gadungan yang lain dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank (*bank secrecy*) dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya (*attorney client privilege*) untuk menyembunyikan identitas pribadinya, dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks. Penggunaan rekening-rekening yang secara luas tersebar itu untuk maksud melakukan pencucian terutama di negara-negara yang tidak melakukan kerjasama dalam melaksanakan investigasi terhadap kegiatan *money laundering*. Dalam beberapa hal para pencuci uang menyamarkan pemindahan dana tersebut (transfer) seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa agar terlihat sebagai transaksi yang sah.

3. *Integration*

Tahap yang ketiga ialah *integration*, atau adakalanya disebut juga *repatriation and integration*, atau disebut pula *spin dry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*taxable*). Begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang normal melalui cara layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi "uang normal" (*clean money*) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang-barang mewah (*luxury assets*), atau perusahaan-perusahaan (*business ventures*).

Kegiatan *money laundering* dapat pula terkonsentrasi secara geografis sesuai dengan tahap pencucian uang sebagaimana dikemukakan di atas. Pada tahap *placement* misalnya, dana tersebut biasanya diproses di tempat di dekat dimana aktivitas yang menghasilkan dana itu dilakukan. Pada tahap layering, pencuci uang yang bersangkutan mungkin memilih suatu *offshore financial centre*, pusat bisnin regional yang besar (a *large business centre)* atau pusat perbankan dunia (*a world banking centre*), yaitu di mana saja yang menyediakan infrastruktur keuangan atau bisnis yang memadai. Pada tahap ini dana yang dicuci tersebut mungkin saja hanya transit di rekening-rekening bank di beberapa tempat, yang dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak mengenai sumber atau tujuan akhir dari dana tersebut. Akhirnya, pada tahap *integration*, para pencuci uang dapat memilih untuk menginvestasikan dana yang telah dicuci itu di lokasi lain apabila negara tersebut ekonominya tidak terlalu booming atau di negara tersebut kesempatan-kesempatan investasinya sangat terbatas.

Dalam tahap *immersion / placement* adalah hal yang paling rentan (*vulnerable*) bagi pencuci uang karena apabila pencuci uang tidak dapat memasukkan uang haram tersebut ke dalam proses pencucian, maka ia tidak akan dapat mencuci uang haram tersebut. Namun sekali uang haram itu berhasil dikonversikan ke dalam nomor-nomor rekening bank, yang muncul di suatu layar komputer dan nomor-nomor tersebut berhasil dipindahkan mondar-mandir melintasi dunia, maka hal itu seperti halnya riak air sebagaimana digambarkan di atas lenyap dan batu tersebut terkubur di dalam lumpur di dasar kolam itu. Artinya pencuci uang haram berhasil "menormalkan" sehingga mereka secara sah/tanpa dipersoalkan secara hukum untuk dipakai dapai kegiatan bisnis normal.

Perkiraan Jumlah Uang Haram Yang Terkait

Sekalipun tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyaknya uang yang dicuci setiap tahun melalui kegiatan *money laundering*, tetapi jumlah perkiraannya sangat besar. Demikian besarnya nilai uang yang terlibat dalam pencucian uang, sehingga menurut nilainya itu pencucian uang merupakan industri terbesar ketiga dunia. Perkiraan yang paling mutakhir mengemukakan bahwa aktivitas *money laundering* di seluruh dunia mencapai kurang-lebih US$ 1 triliun setiap tahun, dimana $ 300-500 milyar dari jumlah itu merupakan pencucian yang berasal dari *drug trafficking*. Diperkirakan volume dari *cross-border money laundering* adalah antara 2 sampai 5% dari gross domestic product (GDP) dunia. Bahkan batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *narcotics trafficking, arms trafficking, bank fraud, securities fraud, counterfeiting*, dan kejahatan yang sejenis itu, yang dicuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir US$600 milyar. Berdasarkan angak statistik 1996, persentase-persentase ini menunjukkan kisaran angka antara USD 590 miliar dan USD 1.5 triliun. Angka yang terendah kurang lebih sama dengan nilai jumlah output ekonomi Spanyol atau bahkan GNP Kanada. Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba saja (*illicit drug trade*) berkisar antara US $300 miliar dan US $500 miliar.

Kejahatan Ekonomi lewat mekanisme *Cyber Crime*

Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan di masa depan tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Jaringan informasi global atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun internasional. Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas ataupun kedaulatan suatu negara. Semua ini menjadi motif dan modus operandi yang amat menarik bagi para pelaku kejahatan digital (*cyber crime).*

Manifestasi *cyber crime* yang terjadi selama ini dapat muncul dalam berbagai macam bentuk atau varian yang amat merugikan bagi kehidupan masyarakat ataupun kepentingan suatu bangsa dan negara pada hubungan internasional. *Cyber crime* dewasa ini mengalami perkembangan pesat tanpa mengenal batas wilayah negara lagi (*borderless state*), karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Para *hacker* dan *cracker* bisa melakukannya lewat lintas negara (*cross boundaries countries*) bahkan di negara-negara berkembang, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian masih kesulitan untuk menangkal dan menanggulangi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki.

Di sisi lain, kemampuan para hacker dan cracker dalam “mengotak-atik” internet juga semakin andal untuk mengacaukan dan merusak data korban. Mereka dengan cepat mampu mengikuti perkembangan baru teknologi bahkan menciptakan pula “jurus ampuh” untuk membobol data rahasia korban atau virus perusak yang tidak dikenal sebelumnya. Perbuatan ini jelas akan menimbulkan kerugian besar dialami para korban yang sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat mengingat ada pula *antibody* virus tidak mudah ditemukan oleh pembuat software komputer.

Wajar kejahatan mayantara akan menjadi momok baru yang menakutkan bagi setiap orang bahkan masyarakat internasional dewasa ini dan masa depan akibat kemajuan teknologi yang digunakan bukan untuk tujuan kemaslahatan umat manusia, akan tetapi menghancurkan hasil rasa, karsa dan cipta orang lain. Berdasarkan catatan dari *National Criminal Intellengence Services* (NCIS) di Inggris terdapat 13 macam bentuk-bentuk *cybercrime*.

Pertama, *Recreational Hackers*, kejahatan ini dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk iseng-iseng mencoba kekurangandalan dari sistem sekuritas atau keamanan data suatu perusahaan. Tujuan iseng-iseng ini oleh pelaku dimaksudkan sekedar hiburan akan tetapi mempunyai dampak pada kejahatan mayantara yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Kedua, *Crackers* atau *Criminal Minded Hackers*, yaitu pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan penghancuran data pihak korban. Sebagai contoh pada tahun 1994 Citibank AS di Inggris mengalami kebobolan senilai US $ 400.000 oleh cracker dari Rusia. Pelaku akhirnya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun serta harus mengembalikan sejumlah uang yang dijarah. Tipe kejahatan ini dapat terjadi dengan bantuan orang dalam yakni biasanya adalah staf karyawan yang "sakit hati" atau datang dari kompetitor dalam kegiatan bisnis sejenis.

Ketiga, *Political Hackers*, yakni aktivis politik atau hactivist melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program-program tertentu bahkan tidak jarang digunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawan politiknya. Usaha tersebut pernah dilakukan secara aktif dalam usaha untuk kampanye anti Indonesia pada masalah Timor Timur yang dipelopori oleh Ramos Horta dan kawan-kawan sehingga situs Departemen Luar Negeri Republik Indonesia sempat mendapat serangan yang diduga keras dari kelompok anti integrasi sebelum dan setelah jajak pendapat tentang Referendum Timor Timur tahun 1999 lalu.

Keempat, *Denial of Service Attack*. Serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian, karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit yang menguras tenaga dan energi.

Kelima, *Insiders (Internal) Hackers* yang biasanya dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Modus operandinya adalah karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan pimpinan korporasi dengan merusak data atau akses data dalam transaksi bisnis. Contoh Departemen Perdagangan dan Perindustrian Inggris pernah mengumumkan bahwa tahun 1998 perusahaan di negeri itu menderita kerugian senilai 1,5 miliar poundsterling, akibat kelakuan musuh dalam "selimut" ini.

Keenam, *viruses*. Program pengganggu (*malicious*) perangkat lunak dengan melakukan penyebaran virus yang dapat menular melalui aplikasi internet, ketika akan diakses oleh pemakai. Sebelum ditemukan internet, pola penularan virus oleh *hackers* hanya bisa melalui *floppy disk*. Akan tetapi dengan berkembangnya internet dewasa ini, virus dapat bersembunyi di dalam file dan *downloaded* oleh *user* (pemakai) bahkan menyebar pula melalui kiriman e-mail. Seperti "dunia kedokteran", maka pada "dunia komputer" memang telah menciptakan jurus anti virus seperti Melissa 1999 atau Lovebug 2000 dan sebagainya, namun masih belum dapat berbuat banyak untuk membasmi semua jenis virus komputer yang terus berkembang dengan pesat.

Ketujuh, *piracy*. Pembajakan *software* atau perangkat lunak komputer merupakan trend atau kecenderungan yang terjadi dewasa ini, karena dianggap lebih mudah dan murah untuk dilakukan para pembajak dengan meraup keuntungan berlipat ganda. Pihak produsen *software* yang memproduksi piranti induk (*master*) dari permainan (*games*), film dan lagu dapat kehilangan profit atau keuntungan karena karyanya dibajak melalui download dari internet dan dikopi ke dalam bentuk CD-ROM yang selanjutnya diperbanyak secara ilegal atau tanpa seizin penciptanya melalui *video caset decoder* (vcd), *compact disc* (cd), *play station* dan *cassete recorder*.

Kedelapan, *fraud* adalah sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh adalah harga tukar saham yang menyesatkan melalui rumour yang disebarkan dari mulut ke mulut atau tulisan. Begitu juga dengan situs lelang fiktif dengan mengeruk uang masuk dari para peserta lelang karena barang yang dipesan tidak dikirim bahkan identitas para pelakunya tidak dapat dilacak dengan mudah.

Kesembilan, *gambling*. Perjudian di dunia mayantara semakin global sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara berdasarkan pada locus delicti atau tempat kejadian perkara, karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi dengan sarana komputer yang dimilikinya secara mobil. Dari kegiatan gambling ini (juga kejahatan-kejahatan lainnya seperti pengedaran narkoba, perdagangan senjata gelap, dll.), uang yang dihasilkan dapat diputar kembali di negara yang merupakan *the tax haven*, seperti Cayman Island yang juga merupakan surga bagi para pelaku money laundering. Indonesia sering pula dijadikan oleh pelaku sebagai negara tujuan pencucian uang yang diperoleh dari hasil kejahatan berskala internasional. Upaya mengantisipasinya adalah diterbitkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.

Kesepuluh, *pornography and paeddophilia*. Perkembangan dunia mayantara selain mendatangkan berbagai kemaslahatan bagi umat manusia dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga telah melahirkan dampak negatif berupa "dunia pornografi" yang mengkhawatirkan berbagai kalangan terhadap nilai-nilai etika, moral dan estetika. Melalui news group, chat rooms bahkan mengeksploitasi pornografi anak-anak di bawah umur, kegiatan *hackers* ini amat meresahkan bagi kalangan orang tua, agamawan dan masyarakat beradab.

Kesebelas, *cyber stalking* adalah segala bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki oleh *user* atau *junk e-mail* yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan. Walaupun e-mail "sampah" ini tidak dikehendaki oleh para user bahkan secara paksa memperoleh identitas personal secara detail tentang calon para korbannya, akan tetapi kiriman ini sangat merepotkan dan menghabiskan waktu user untuk membersihkan halaman komputernya dari "sampah" tidak diundang ini. Para pemakai komputer hanya bisa menggerutu terhadap pelakunya.

Duabelas, *hate sites*. Situs ini sering digunakan oleh *hackers* untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para "ekstrimis" untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap lawan atau opponent ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan (isme) yang dianut oleh seseorang/kelompok, bangsa dan negara untuk bisa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain sebagai "pesan" yang disampaikan.

Ketigabelas, *criminal communications*. NCIS telah mendeteksi bahwa internet dijadikan sebagai alat yang andal dan moderen untuk melakukan kegiatan komunikasi antar gangster, anggota sindikat obat bius dan bahkan komunikasi antar "hooligan" di dunia sepakbola Inggris. Komunikasi lewat internet merupakan alat atau sarana yang cukup ampuh untuk melakukan kejahatan terorganisir.

Bagaimanakah dengan kasus kriminalitas atau modus operandi yang berbasiskan pada teknologi digital di Indonesia?. Beberapa kasus kejahatan mayantara yang terjadi dan ditangani oleh penegak hukum kepolisian lebih banyak bermotifkan pada masalah ekonomi antara lain pembobolan rekening bank yang dialami BNI Cabang New York (1987) dengan kerugian Rp. 30 miliar, Bank Danamon Jakarta (1990) sebanyak Rp. 372 miliar, Bank Panin Cabang Senayan, Jakarta (1995) sebanyak Rp. 4,2 miliar, Hongkong Bank di Jakarta (1996) sebanyak Rp. 96 miliar. Kasus penyadapan credit card pada beberapa daerah sempat marak pada tahun 2001 lalu.

Bentuk-bentuk dari kejahatan mayantara lain bukan berarti tidak pernah terjadi di Indonesia, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh para korban pada pihak kepolisian, maka masalah ini tidak menonjol dan menjadi prioritas penegakan hukum. Keadaan demikian sebenarnya akan menjadi kejahatan tersembunyi (*hidden crime of cyber*) pada masa depan apabila tidak ditanggulangi secara hukum.

Gambaran Skematik Kejahatan Ekonomi

Dengan uraian tentang dampak negatif globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional seperti diatas, maka penulis mencoba menyimpulkan dua gambaran. Pertama, dalam gambar 1 di bawah ini digambarkan hubungan timbal balik antara kejahatan ekonomi tingkat nasional dan tingkat internasional dengan perkembangan *information & Communication Technology* (ICT) dan globalisasi yang pada gilirannya menimbulkan perkembangan yang dahsyat terhadap kejahatan ekonomi beserta aliran uang hasil dari kejahatan ekonomi tersebut. Gambar 2 merupakan gambaran hipotetis antara Kejahatan Ekonomi dengan aktivitas lain (bisnis dan perdagangan, birokrasi, ekonomi, politik, media, militer, polisi, intelektual, dst.) akibat adanya intermediasi instrumnen *money laundering*.

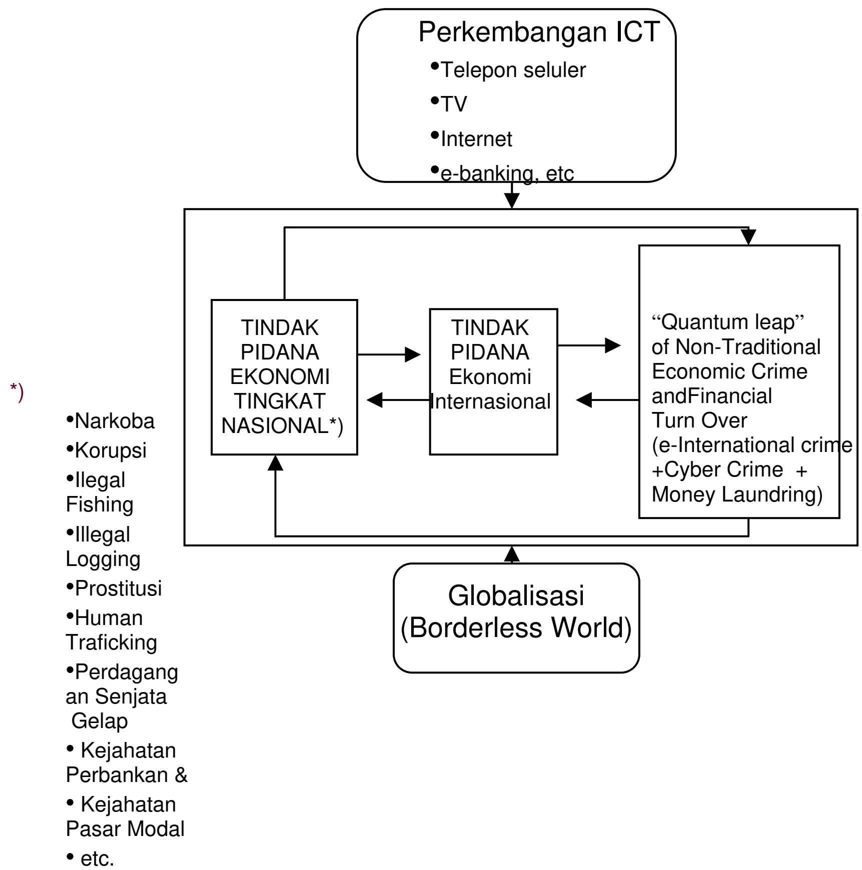

Gambar 1. Perkembangan Kejahatan Ekonomi Internasional

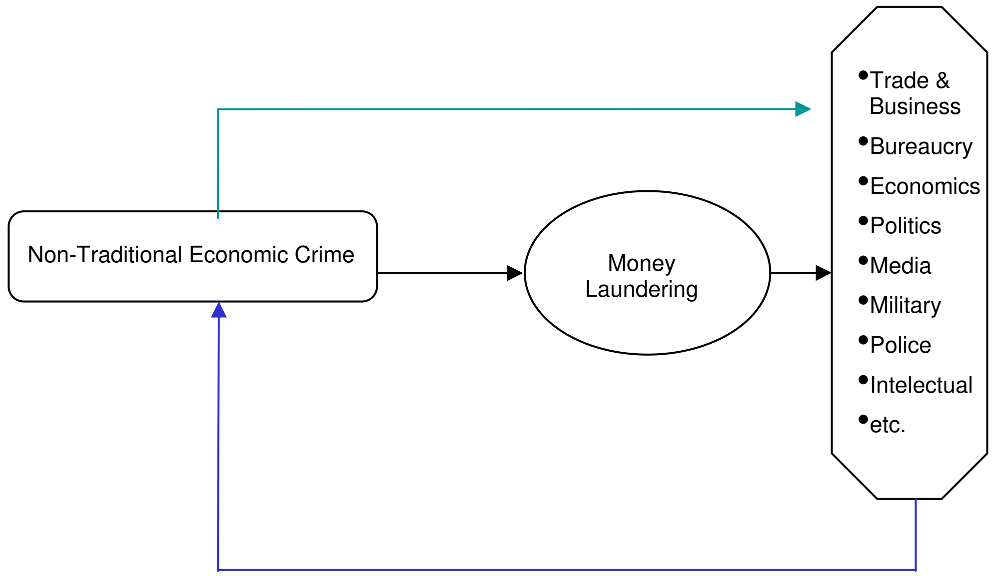

Gambar 2. Hipotesis Hubungan Non-Traditional Crime dengan Aktivitas Lain

Penutup

Demikian makalah ini telah menggambarkan bagaimana perkembangan globalisasi perekonomin yang telah dan akan membawa dampak poitif sekaligus negatif termasuk dampak negatif, khususnya dalam bentuk perkembangan dahsyat dalam kejahatan ekonomi internasional yang mengharuskan bangsa Indonesia, khususnya aparat keamanan untuk mencermati dan melakukan pelbagai upaya pencegahan yang memadai. Dengan demikian bangsa Indonesia dapat terhindar dari perangkap kejahatan ekonomi yang dapat merugikan bahkan menghancurkan bangsa Indonesia keseluruhan. Semoga...

Referensi

1. Didin S Damanhuri, 2006. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2. __________________, 1999. *Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi-Politik.* Jakarta, Pustaka Hidayah-CIDES.
3. www.http.yahoo.com dan www.http.google.com. Berbagai tulisan tentang *International Economic Crime.*